



## STAI PANCA BUDI At-Taklim: Jurnal Pendidikan Islam

E-ISSN : 3125-0416 (Online)  
Vol. 1, No. 1, Bulan April Tahun 2026

Available online at:

<https://journal.pancabudi-stai.ac.id/index.php/at-taklim/index>

### KONSISTENSI KOMUNIKASI POLITIK PRABOWO SUBIANTO DARI MASA KAMPANYE HINGGA MENJADI PRESIDEN

Yola Dwi Ariani<sup>1</sup>, Fikria Az-Zahra<sup>2</sup> Khoirul Umam<sup>3</sup>

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

[244110402145@mhs.uinsaizu.ac.id](mailto:244110402145@mhs.uinsaizu.ac.id)<sup>1</sup>, [244110402116@mhs.uinsaizu.ac.id](mailto:244110402116@mhs.uinsaizu.ac.id)<sup>2</sup>,

[244110402122@mhs.uinsaizu.ac.id](mailto:244110402122@mhs.uinsaizu.ac.id)<sup>3</sup>

#### Abstrak

Komunikasi politik memiliki peran penting dalam kepemimpinan karena membentuk kepercayaan publik dan memengaruhi arah kebijakan. Penelitian ini mengkaji konsistensi komunikasi politik Prabowo Subianto sejak masa kampanye hingga menjabat sebagai presiden dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, media nasional, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang dinamis antara narasi kampanye dan implementasi kebijakan. Perbedaan antara janji saat kampanye dan kebijakan yang dijalankan menimbulkan berbagai penafsiran di masyarakat mengenai konsistensi kepemimpinan. Dari perspektif filsafat pendidikan, fenomena ini berkaitan dengan nilai integritas, tanggung jawab moral, dan keteladanan sebagai bagian dari pendidikan politik. Oleh karena itu, konsistensi dalam komunikasi tidak hanya penting untuk menjaga kepercayaan publik, tetapi juga untuk membentuk kesadaran politik dan nilai moral masyarakat. Pada akhirnya, komunikasi pemimpin menjadi acuan bagi masyarakat dalam memahami dan menilai etika politik.

**Kata Kunci:** *Kepemimpinan; Filsafat Pendidikan; Komunikasi Politik; Konsistensi Politik; Kebijakan Publik*

#### Abstract

*Political communication plays a vital role in leadership as it shapes public trust and influences policy direction. This study examines the consistency of Prabowo Subianto's political communication from the campaign period to his presidency using a qualitative literature review approach. Data were collected from academic journals, national media, and policy documents. The findings reveal a dynamic relationship between campaign narratives and actual policy implementation. Differences between promises made during the campaign and the policies carried out in office have led to diverse public interpretations regarding leadership consistency. From the perspective of educational philosophy, this issue reflects the importance of integrity, moral responsibility, and exemplary leadership as part of political education. Consistency in communication is therefore essential not only for maintaining public trust but also for fostering political awareness and moral values in society. Ultimately, leadership communication serves as a reference point for how citizens understand and evaluate political ethics.*

**Keyword:** *Leadership; Philosophy Of Education; Political Communication; Political Consistency; Public Policy*

#### PENDAHULUAN

Komunikasi politik adalah unsur krusial dalam sistem demokrasi karena berfungsi sebagai alat utama bagi pemimpin untuk menyampaikan visi, program, dan kebijakan kepada publik. Dengan komunikasi politik, seorang pemimpin tidak hanya menciptakan citra pribadi, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat memandang serta tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Komunikasi politik merupakan kajian mengenai metode komunikasi yang dipakai untuk memengaruhi pemahaman masyarakat, keyakinan, dan langkah-langkah

politik, serta keterkaitan antara kampanye politik dan objeknya. Cara berkomunikasi dari para elit politik berperan penting dalam membangun kepercayaan di kalangan masyarakat di berbagai tingkatan.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, kesesuaian antara pesan yang disampaikan selama kampanye dan implementasi setelah meraih kekuasaan sangat penting untuk menilai kualitas kepemimpinan.

Kehidupan berpolitik adalah area yang tidak disukai publik karena: (1) sikap para politisi yang seringkali berbeda antara kata-kata dan apa yang mereka lakukan; (2) dunia politik terlalu sering menampilkan perselisihan dan tindakan kekerasan; (3) ada banyak politisi yang terlibat dalam perilaku yang kurang baik; (4) masyarakat begitu mudah terjebak dalam sikap acuh tak acuh.<sup>2</sup>

Dalam konteks politik di Indonesia, perubahan komunikasi politik bisa dilihat dari perjalanan Prabowo Subianto dari masa kampanye hingga setelah ia menjabat sebagai presiden. Selama kampanye, komunikasi politik lebih bersifat meyakinkan, menjangkau masyarakat luas, dan berfokus pada pendukung. Namun, setelah menjabat, cara berkomunikasi berubah menjadi lebih resmi, terencana, dan menekankan pada penyampaian kebijakan serta prestasi pemerintah. Perubahan ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana konsistensi dalam komunikasi politik bisa dipertahankan saat menjalankan pemerintahan.

Di sisi lain, dari sudut pandang filsafat pendidikan, komunikasi politik tidak sekadar dilihat sebagai cara untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, tetapi juga sebagai alat pembelajaran bagi masyarakat dalam memahami nilai-nilai demokrasi, tanggung jawab, dan etika kepemimpinan. Dengan demikian, cara seorang pemimpin berkomunikasi dapat mempengaruhi peningkatan kesadaran politik dan sikap kritis masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan komunikasi politik Prabowo Subianto selama masa kampanye dan setelah menjabat sebagai presiden, serta menilai adanya perubahan atau konsistensi dalam pola komunikasi tersebut. Selain itu, studi ini juga berusaha mengaitkan fenomena itu dengan perspektif filsafat pendidikan sebagai bagian dari proses pembentukan nilai dan kesadaran politik di kalangan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih untuk menggambarkan dan memahami fenomena komunikasi politik secara mendalam, khususnya terkait perubahan dan konsistensi komunikasi politik Prabowo Subianto dari masa kampanye hingga masa pemerintahan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), dengan mengkaji berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, artikel media nasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola komunikasi, perubahan yang terjadi, serta makna yang terkandung di dalamnya.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan filsafat pendidikan sebagai kerangka analisis untuk menafsirkan fenomena komunikasi politik. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana komunikasi politik tidak hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran nilai-nilai moral, seperti integritas, tanggung jawab, dan keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>1</sup> Korbeka Aura Isabella, "Pengaruh Komunikasi Politik Terhadap Kepercayaan Publik Di Kabupaten Sintang," n.d.

<sup>2</sup> Majalah Al-mizan Edisi, "Mensejahterakan Rakyat Indonesia Yang Merata Melalui Mekanisme Demokrasi (Refleksi Terhadap Pemilu 2024)," in *Majalah Al Mizan*, 2024, 1–64.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian komunikasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pengertian komunikasi dari sudut bahasa (etimologis) dan pengertian komunikasi dalam istilah (terminologis). Dari sisi etimologi, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin "communicatio" yang berakar dari "communis" yang berarti sama. Dalam konteks ini, "sama" yang dimaksud adalah kesamaan makna. Artinya, komunikasi terjadi ketika individu-individu yang terlibat memiliki persepsi yang sejalan mengenai hal yang sedang dibicarakan. Dengan demikian, jika para pihak yang terlibat saling memahami, maka interaksi di antara mereka dianggap komunikatif. Sebaliknya, jika salah satu pihak tidak memahami mengenai hal yang sedang dibahas, maka proses komunikasi tidak terlaksana, dan interaksi antara mereka tidak bersifat komunikatif.<sup>3</sup>

Secara terminologis, komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu individu kepada individu lain. Dalam perspektif umum, komunikasi dipahami sebagai proses pengiriman pesan untuk menyampaikan informasi atau memengaruhi sikap dan perilaku, baik secara langsung maupun melalui media. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan komunikasi untuk berinteraksi, baik secara personal maupun kelompok, sehingga interaksi sosial merupakan kebutuhan alami sesuai dengan fitrah manusia.<sup>4</sup>

Dalam komunikasi terdapat berbagai model yang menekankan unsur berbeda seperti sumber, saluran, penerima, dan efek. Pada dasarnya, komunikasi adalah proses penyampaian ide dan emosi dari komunikator kepada komunikan. Ide bisa berupa informasi atau pendapat, sedangkan emosi mencakup perasaan seperti keyakinan, keraguan, atau semangat. Komunikasi dapat berlangsung hanya dengan ide, hanya emosi, atau gabungan keduanya. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh kemampuan menyampaikan ide yang didukung emosi secara tepat; sebaliknya, komunikasi bisa gagal jika emosi tidak terkelola dengan baik.<sup>5</sup>

### 1. Komunikasi Publik

Komunikasi publik adalah interaksi antara seorang komunikator dengan audiens dalam jumlah besar. Prosesnya dapat berlangsung secara langsung (tatap muka tanpa perantara) maupun tidak langsung melalui media. Pada dasarnya, komunikasi publik merupakan penyampaian pesan kepada khalayak luas, baik dalam pertemuan langsung maupun dengan bantuan teknologi, sehingga jangkauan komunikasinya menjadi lebih luas.<sup>6</sup>

Komunikasi publik adalah serangkaian strategi komunikasi yang ditujukan kepada audiens tertentu dengan tujuan menyampaikan informasi, meningkatkan kesadaran, serta memengaruhi sikap atau tindakan. Proses ini memanfaatkan berbagai media secara terencana dan bersifat lebih terstruktur serta formal dibandingkan komunikasi interpersonal atau kelompok, karena berfokus pada pencapaian tujuan tertentu.<sup>7</sup>

Pengelolaan komunikasi publik merupakan proses pengaturan informasi publik yang mencakup tahap perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan komunikasi terkait kebijakan dan program pemerintah. Dalam praktiknya, pengelolaan ini memiliki beberapa ciri utama, yaitu memberikan layanan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan yang telah,

---

<sup>3</sup> Zikri Fachrul Nurhadi and Achmad Wildan Kurniawan, "Kajian Tentang Efektivitas Pesan Dalam Berkomunikasi," *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran Dan Penelitian* 3, no. 1 (2017): 90–95.

<sup>4</sup> Hariyanto Didik, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Komunikasi Penulis: Didik Hariyanto Diterbitkan Oleh Jl . Mojopahit 666 B Sidoarjo ISBN : 978-623-6081-32-7 Copyright © 2021 . Authors All Rights Reserved, Pengantar Ilmu Komunikasi*, 2021.

<sup>5</sup> Uchjana, *Ilmu Komunikasi, Teori Dan Praktek, Komunikasi Dalam Sebuah Organisasi*, 2019.

<sup>6</sup> Achmad Mucharam, "Membangun Komunikasi Publik Yang Efektif," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 27, no. 1 (2022): 71–82.

<sup>7</sup> Centurion Chandratama Priyatna et al., "Optimalisasi Teknologi Informasi Oleh Lembaga Pemerintah Dalam Aktivitas Komunikasi Publik," *Jurnal Kajian Komunikasi* 8, no. 1 (2020): 114, <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i1.26115>.

sedang, dan akan dijalankan; melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan; berlandaskan pada fakta, data, serta pembaruan informasi; menyampaikan informasi secara proporsional tanpa bersikap ofensif maupun defensif; serta berfungsi sebagai sarana edukasi di ruang publik.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007, humas pemerintah dipahami sebagai kegiatan yang dijalankan oleh lembaga atau individu dengan fungsi manajerial di bidang komunikasi dan informasi, baik kepada publik maupun pemangku kepentingan. Dalam hal ini, humas pemerintah berperan penting dalam menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Sejalan dengan itu, Astrid S. Susanto menjelaskan bahwa *government public relations* bertujuan untuk membentuk opini publik serta menciptakan iklim yang mendukung terhadap kebijakan dan instansi pemerintah.<sup>8</sup>

## **2. Makna Kepemimpinan dan Kebijakan Publik**

Kepemimpinan merupakan proses memengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan memberi instruksi, tetapi juga membangun hubungan yang saling menguntungkan antara pemimpin dan pengikut. Seorang pemimpin yang efektif mampu memahami kebutuhan dan potensi anggota tim, serta menyesuaikan pendekatannya untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan bersama. Kepemimpinan yang baik juga tidak sekadar memberi arah, tetapi mampu memotivasi pengikut melalui visi yang jelas dan strategi yang terukur.

Selain itu, berbagai definisi kepemimpinan menekankan bahwa pengaruh merupakan inti utamanya. Pemimpin adalah individu yang mampu mengubah cara pandang dan perilaku orang lain melalui tindakan, komunikasi yang efektif, serta dorongan yang memotivasi. Dengan demikian, kepemimpinan tidak hanya soal memberi perintah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan dan mendorong anggota untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi.<sup>9</sup>

Konsistensi merupakan landasan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tercermin dalam perilaku manusia, seperti sikap, tindakan, serta cara pandang terhadap dunia dan diri sendiri. Dalam proses komunikasi, manusia berusaha membangun pemahaman yang logis dan bermakna. Namun, pada praktiknya, konsistensi ini sering terganggu karena adanya ambisi pribadi, sehingga seseorang dapat menyesuaikan bahkan mengubah logika demi mencapai keinginannya.<sup>10</sup>

Secara umum, komunikasi kebijakan memiliki tiga elemen utama, yaitu penyampaian, keselarasan, dan ketepatan. Dalam penyampaian, pelaksana kebijakan harus memahami dengan jelas peran dan arahan yang diberikan, sehingga informasi perlu disampaikan kepada pihak yang tepat dengan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, keselarasan penting agar kebijakan berjalan efektif, sehingga arahan yang diberikan konsisten dan tidak saling bertentangan. Terakhir, ketepatan menekankan bahwa instruksi tidak hanya harus sampai kepada pelaksana, tetapi juga disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Thoriq Ramadani, "Pengelolaan Komunikasi Publik," *Jurnal Good Governance* 15, no. 1 (2019): 11–27, <https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.42>.

<sup>9</sup> M. Imamul M Rizal A, "Konsep Dasar Kepemimpinan: Dari Definisi Hingga Tipologi Pemimpin Efektif," *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 1 (2025): 159–66, <https://books.google.co.id/books?id=dITJAAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=NyW3B9GGD0&lr&hl=id&pg=PA24#v=onepage&q&f=false>.

<sup>10</sup> Ali Syamsuddin Amin, "Komunikasi Sebagai Penyebab Dan Solusi Konflik Sosial," *Jurnal Common* / 1 (2017).

<sup>11</sup> Indah Cahyani, "Optimalisasi Komunikasi Publik Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah," *Pore-Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 1, no. 1 (2025): 54–68.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kebijakan merujuk pada sekumpulan konsep dan prinsip yang menjadi kerangka serta dasar rencana untuk melaksanakan suatu tugas, kepemimpinan, dan metode bertindak (terkait dengan pemerintahan, organisasi, dan lain-lain); sebuah deklarasi tentang cita-cita, sasaran, prinsip, dan pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai target. Kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau aktivitas yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu yang dihadapkan pada rintangan serta peluang untuk menerapkan kebijakan tersebut guna mencapai tujuan tertentu.<sup>12</sup>

Filsafat ilmu berperan penting dalam mengarahkan pendidikan politik di Indonesia agar tidak hanya bersifat formal dan informatif, tetapi juga menjadi lebih reflektif, kritis, dan partisipatif. Melalui filsafat ilmu, penggunaan pengetahuan tidak hanya difokuskan pada kepentingan teknis atau kekuasaan, melainkan juga untuk meningkatkan kesadaran. Dalam konteks politik, hal ini penting agar pendidikan dan pengetahuan politik tidak terjebak pada tujuan pragmatis seperti mempertahankan kekuasaan, tetapi dapat memberi manfaat luas bagi masyarakat serta memperkuat sistem demokrasi.

Di Indonesia, pendidikan politik memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang sadar hak dan kewajiban, kritis terhadap kebijakan, serta aktif dalam demokrasi. Idealnya, pendidikan politik mendorong pemahaman dan partisipasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya sering bersifat seremonial dan elit, lebih banyak berupa sosialisasi satu arah tanpa ruang dialog. Akibatnya, masyarakat cenderung pasif, mudah terpengaruh isu, dan kurang reflektif terhadap kondisi politik di sekitarnya.

Dengan menggunakan pendekatan epistemologi kritis, pendidikan politik dapat diarahkan pada pembentukan kesadaran kritis warga negara, bukan sekadar pemahaman prosedural tentang politik. Misalnya, masyarakat tidak hanya tahu cara mencoblos dalam pemilu, tetapi juga memahami bagaimana kebijakan publik dibuat, bagaimana kekuasaan bekerja, dan bagaimana mereka bisa ikut mengontrolnya. Pendidikan politik berbasis epistemologi kritis akan menumbuhkan kemampuan analisis sosial, kesadaran, dan sikap partisipatif yang lebih kuat.<sup>13</sup>

### **3. Komunikasi Politik Saat Kampanye**

Pemilu di Indonesia pada tahun 2024 membawa banyak kejutan, memicu berbagai kontroversi dan mengakibatkan perubahan besar dalam arah demokrasi di negara ini. Perubahan penting dalam syarat untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden menjadi sorotan utama. Perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 2023 mengenai Pemilu, yang secara signifikan menurunkan usia minimum untuk mendaftar sebagai presiden dan wakil presiden, telah diterima secara konsensus oleh Mahkamah Konstitusi. Usia yang kini diturunkan dari 30 tahun menjadi 25 tahun memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk berkompetisi di jajaran politik tertinggi.

Pesan memiliki posisi penting sebagai sarana untuk menyalurkan ide, tujuan, dan nilai pasangan calon kepada masyarakat. Kampanye bukan sekadar sekumpulan data, melainkan bentuk komunikasi yang terencana untuk membentuk pemahaman, menciptakan kepercayaan, serta mempengaruhi sikap dan tindakan pemilih. Pesan berfungsi sebagai penghubung utama antara calon dan publik, di mana keberhasilan suatu kampanye ditentukan oleh seberapa baik, sesuai, dan efektif pesan tersebut disampaikan.

---

<sup>12</sup> Taufiqurokhman, *KEBIJAKAN PUBLIK Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, 2024.

<sup>13</sup> St Ika et al., "Pengembangan Filsafat Ilmu Dalam Revitalisasi Pendidikan Politik Di Indonesia" 7, no. 1 (2026): 1008–15.

Pasangan calon, tim pemenangan atau tim sukses, dan relawan memiliki fungsi yang krusial dalam mengedarkan informasi kampanye. Tim pemenangan mengomunikasikan visi dan misi, sementara relawan berperan sebagai penghubung utama antara kandidat dan publik. Mereka membantu memperluas jaringan kampanye dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Kampanye ini fokus pada program kesejahteraan sosial, seperti penyediaan makanan gratis bagi pelajar, dukungan gizi untuk ibu yang hamil, dan bantuan gizi untuk anak-anak.<sup>14</sup>

Gaya politik Prabowo ini sejalan dengan teori komunikasi politik yang dikemukakan oleh Thomas T. P. yang menyatakan bahwa strategi komunikasi politik digunakan untuk menarik perhatian, membujuk, membangun, dan mengembangkan hubungan politik oleh individu atau partai politik dalam periode tertentu.<sup>15</sup>

Pada kampanye Pemilu 2024, Prabowo menampilkan citra baru yang lebih santai, humoris, dan dekat dengan anak muda. Strategi ini bertujuan menarik pemilih muda serta menyesuaikan diri dengan pengaruh media sosial, dengan menghadirkan citra yang lebih santai, gemoy, dan bersahaja, Prabowo berupaya untuk mengatasi citra ketegasan dan kedisiplinan yang mungkin melekat pada dirinya dari pemilihan sebelumnya. Strategi Prabowo dalam membentuk personal branding yang baru dan saat ini citra Prabowo yang “gemoy” sudah cukup melekat dipandangan masyarakat. Ia berusaha mengubah kesan lama yang kaku menjadi lebih bersahabat guna memperluas dukungan politiknya.<sup>16</sup>

Secara singkat, gaya komunikasi politik Prabowo Subianto ditampilkan dengan cara yang lebih akrab dan casual, serta ia kadang menggunakan ekspresi tubuh yang bisa mengundang tawa. Ia menyampaikan informasi terkait program-programnya, seperti pembagian makan siang dan susu gratis bagi pelajar serta ibu hamil, atau melanjutkan beberapa inisiatif yang diperkenalkan oleh Jokowi, yang mengandung arti dan pesan politik tersendiri. Berita ini juga disebarluaskan melalui beragam platform media sosial, seperti Podcast di YouTube atau konten yang di-post oleh pengikutnya di Instagram, Twitter, dan Tiktok.<sup>17</sup>

#### **4. Komunikasi Politik Setelah Menjadi Presiden**

Selama satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran, analis Mahadata LAB45 Diyauddin mencatat berbagai blunder komunikasi yang terbagi dalam tiga kategori: kebijakan, personal, dan program prioritas. Blunder kebijakan menjadi yang paling dominan, terutama dalam penyampaian atau artikulasi kebijakan pemerintah.

Tercatat 81 kasus blunder kebijakan dan 70 blunder personal, dengan isu politik sebagai yang paling sering memicu kesalahan komunikasi. Beberapa kasus yang menimbulkan polemik antara lain tagar #KaburAjaDulu, #IndonesiaGelap, kenaikan PPN 12 persen, serta pembatasan gas elpiji 3 kg yang kemudian dibatalkan. Selain itu, terdapat pula pernyataan pejabat yang dinilai melukai masyarakat sipil dan korban peristiwa 1998, serta kontroversi terkait pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan terhadap teror kepala babi ke redaksi Tempo. Menurut Diyauddin, berbagai blunder tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah tidak selalu berjalan mulus, bahkan Presiden Prabowo

---

<sup>14</sup> Ananda Pranata, Bahjatul Murtasidin, and Sandy Pratama, “Komunikasi Politik (Studi Terhadap Kampanye Politik Pasangan Prabowo-Gibran Dalam Pemilihan Presiden 2024 Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)” 01, no. 04 (2025): 3089–0128.

<sup>15</sup> Hafid Hafid, Siti Raudhatul Jannah, and Minan Jauhari, “Strategi Komunikasi Politik ‘Nyantri’ Prabowo Subianto Dalam Memenangkan Pilpres 2024,” *Jurnal Riset Komunikasi* 7, no. 2 (2024): 262–77, <https://doi.org/10.38194/jurkom.v7i2.1041>.

<sup>16</sup> Febriansyah Mulyadi, “Strategi Personal Branding Prabowo Subianto Sebagai Capres Melalui Media Sosial,” *Journal Of Global Humanistic Studies Philosophiamundi.Id* 1, no. 1 (2023): 1.

<sup>17</sup> Eka Yudha Saputra, “Analisis Gaya Komunikasi Politik Calon Presiden Prabowo Subianto Menjelang Pemilihan Presiden 2024,” *Tempo*, 2025, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.11822>.

kerap turun tangan langsung untuk merevisi atau membatalkan kebijakan yang telah dirancang sebelumnya.

Selain itu, pernyataan sejumlah pejabat juga memicu kontroversi di ruang publik. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berjalan efektif dan masih sering menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.<sup>18</sup>

Dalam pidato kenegaraan pertamanya, Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah program prioritas seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan sekolah rakyat. Ia juga menekankan efisiensi anggaran negara dengan mengalihkan dana yang tidak produktif untuk kepentingan masyarakat. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa kekuatan Indonesia terletak pada keberpihakan kepada rakyat. Sementara itu, Prof. Gun Gun Heryanto menilai pidato ini penting untuk membangun kepercayaan publik, namun perlu dibuktikan melalui realisasi program yang nyata.

Gaya komunikasi blak-blakan Prabowo mencerminkan dynamic style. Tegas, agresif, dan penuh penekanan. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana instruksi presiden ini benar-benar dijalankan di lapangan. Pertanyaan pun muncul: apakah program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan layanan kesehatan gratis benar-benar akan terasa manfaatnya di seluruh pelosok negeri?

Satu hal pasti, pidato perdana ini menjadi titik awal pertarungan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Keberhasilan atau kegagalannya akan diukur bukan dari kata-kata, tetapi dari bukti nyata yang dirasakan rakyat Indonesia.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, bentuk komunikasi politik Prabowo Subianto memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok antara fase kampanye dan setelah dia menjabat sebagai presiden. Perbedaan ini terlihat pada cara berkomunikasi, sasaran, saluran yang dipilih, dan kerumitan pesan yang disampaikan. Agar perbandingan ini lebih jelas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Table 1. Perbandingan Komunikasi Politik pada Masa Kampanye dan Masa Pemerintahan.**

| Aspek                  | Masa Kampanye Pemilu (2024)                 | Masa Pemerintahan                              |
|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gaya Komunikasi        | Persuasif, emosional, santai, humoris       | Formal, tegas, langsung                        |
| Tujuan Komunikasi      | Membangun citra dan menarik dukungan publik | Menyampaikan kebijakan dan program pemerintah  |
| Media yang Digunakan   | Media sosial (TikTok, Instagram, YouTube)   | Media resmi, pidato kenegaraan, konferensi     |
| Karakter Pesan         | Karakter Pesan                              | Karakter Pesan                                 |
| Pengelolaan Komunikasi | Pengelolaan Komunikasi                      | Pengelolaan Komunikasi                         |
| Tantangan              | Relatif minim Konflik                       | Kesalahan komunikasi dan kontroversi kebijakan |

---

<sup>18</sup> Saputra.

|                  |                        |                                          |
|------------------|------------------------|------------------------------------------|
| Sifat Komunikasi | Proaktif dan terencana | Cenderung lebih reaktif terhadap situasi |
|------------------|------------------------|------------------------------------------|

*Source: Diolah Oleh Penulis (2026)*

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa komunikasi politik selama periode kampanye cenderung fokus pada penyederhanaan pesan dan penciptaan persepsi di mata masyarakat. Sementara itu, pada saat pemerintahan, komunikasi menjadi lebih rumit karena terkait dengan kenyataan kebijakan dan penerapannya. Pergantian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan situasi kekuasaan serta tanggung jawab yang diemban.

Namun, perubahan ini juga menimbulkan pertanyaan penting tentang konsistensi informasi yang disampaikan kepada publik, terutama mengenai keselarasan antara data saat kampanye dan kenyataan kebijakan setelah pejabat menjabat.

Gaya berkomunikasi politik Prabowo Subianto dianalisis melalui lensa Aksiologi, Ontologi, dan Epistemologi.

a. Aksiologi

Aksiologi merupakan salah satu bidang dalam filsafat yang mempelajari nilai dan prinsip moral. Ini melibatkan penilaian terhadap nilai-nilai seperti kebaikan, keadilan, kebenaran, dan keindahan, serta mempertimbangkan etika dalam proses pengambilan keputusan. Aksiologi juga menggambarkan bagaimana relasi yang rumit antara nilai-nilai ini dan pedoman moral yang dihasilkan saling berkaitan. Dalam konteks aksiologi keadilan dan kesejahteraan, Prabowo menekankan dalam komunikasi politiknya pentingnya upaya pemberdayaan ekonomi, terutama bagi kalangan masyarakat yang kurang beruntung.

b. Ontologi

Ontologi merupakan cabang dari filsafat yang mempelajari esensi dari pengetahuan, hubungan antara subjek dan objek dalam pengetahuan, serta sifat dari objek yang diketahui. Dalam kajian ontologis, dilakukan penelitian dan analisis untuk menilai eksistensi ilmu pengetahuan. Ontologi sering dianggap sebanding dengan metafisika, yang menjadi pokok perhatian dalam filsafat mengenai kenyataan dan keberadaan. Dalam ranah politik, ontologi politik memberikan wawasan tentang bagaimana realitas politik diterjemahkan dan bagaimana visi politik individu diterapkan dalam situasi politik saat ini. Ontologi politik menjelaskan bagaimana realitas politik terbentuk melalui dialog yang terjadi tidak hanya di antara individu dengan pandangan dunia yang sama, tetapi juga di antara mereka yang memiliki pemahaman atau ontologi yang berbeda. Oleh karena itu, ontologi politik juga dapat dijadikan alat analisis untuk mengevaluasi cara Prabowo mengungkapkan sudut pandanganya terhadap realitas politik dan sejauh mana visinya terwujud dalam kondisi politik saat ini.

c. Epistemologi

Secara umum, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari arti dari ilmu pengetahuan serta cara ilmu pengetahuan tersebut dihasilkan. Inti dari diskusi mengenai epistemologi adalah mengenai sumber ilmu pengetahuan dan asalnya, serta sejauh mana kevalidan ilmu, atau seberapa tepat dan akurat suatu alat ukur dalam menjalankan fungsinya. Epistemologi digunakan untuk menilai kevalidan dan keandalan informasi yang dimanfaatkan oleh Prabowo dalam menyusun pesan politiknya. Proses ini melibatkan pertanyaan tentang apakah informasi yang

digunakan bersumber dari fakta empiris yang dapat dipercaya atau analisis logis yang dapat diandalkan.

Keselaran metode dengan prinsip ilmiah dan objektivitas dievaluasi selama penilaian. Kritik terhadap informasi yang disampaikan mencakup sejauh mana Prabowo bersedia untuk ditanya secara kritis tentang pendapatnya dan apakah dia berusaha untuk memperbaiki atau memperbaharui pengetahuannya. Terakhir, pengakuan terhadap pluralisme pengetahuan merupakan elemen yang sangat penting. Analisis ini mengeksplorasi apakah Prabowo cenderung pada sudut pandang tertentu atau lebih terbuka terhadap beragam sumber dan perspektif. Secara keseluruhan, penerapan epistemologi membantu kita memahami landasan filosofis dari pengetahuan politik Prabowo serta memberikan kerangka untuk menilai kualitas, relevansi, dan keragaman pengetahuan yang menjadi dasar dari komunikasi politiknya.<sup>19</sup>

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan evaluasi, komunikasi politik Prabowo Subianto mengalami perubahan besar dari saat kampanye yang mengedepankan persuasi dan populisme menjadi lebih resmi dan fokus pada kebijakan setelah menjadi presiden. Perubahan ini mencerminkan penyesuaian terhadap tuntutan peran pemerintah, meskipun masih ada tantangan terkait dengan kurangnya efektifitas komunikasi dan munculnya salah paham di masyarakat. Meskipun demikian, ada kesinambungan pada komitmen terhadap program-program utama yang tetap dijaga dalam narasi pemerintahan. Oleh sebab itu, komunikasi politik harus dikelola dengan lebih transparan, konsisten, dan berbasis data agar dapat meningkatkan kepercayaan publik serta menumbuhkan kesadaran politik masyarakat dengan cara yang kritis.

## REFERENSI

- Cahyani, Indah. "Optimalisasi Komunikasi Publik Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah." *Pore-Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 1, no. 1 (2025): 54–68.
- Didik, Hariyanto. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Komunikasi Penulis : Didik Hariyanto Diterbitkan Oleh Jl . Mojopahit 666 B Sidoarjo ISBN : 978-623-6081-32-7 Copyright © 2021 . Authors All Rights Reserved. Pengantar Ilmu Komunikasi*, 2021.
- Edisi, Majalah Al-mizan. "Mensejahterakan Rakyat Indonesia Yang Merata Melalui Mekanisme Demokrasi (Refleksi Terhadap Pemilu 2024)." In *Majalah Al Mizan*, 1–64, 2024.
- Hafid, Hafid, Siti Raudhatul Jannah, and Minan Jauhari. "Strategi Komunikasi Politik 'Nyantri' Prabowo Subianto Dalam Memenangkan Pilpres 2024." *Jurnal Riset Komunikasi* 7, no. 2 (2024): 262–77. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v7i2.1041>.
- Ika, St, Noerwulan Fraja, Fendi Setyawan, M Arief Amrullah, and Moh Wakid. "Pengembangan Filsafat Ilmu Dalam Revitalisasi Pendidikan Politik Di Indonesia" 7, no. 1 (2026): 1008–15.
- Isabella, Korbeka Aura. "Pengaruh Komunikasi Politik Terhadap Kepercayaan Publik Di Kabupaten Sintang," n.d.
- Mucharam, Achmad. "Membangun Komunikasi Publik Yang Efektif." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 27, no. 1 (2022): 71–82.
- Mulyadi, Febriansyah. "Strategi Personal Branding Prabowo Subianto Sebagai Capres Melalui Media Sosial." *Journal Of Global Humanistic Studies Philosophiamundi.Id* 1, no. 1 (2023): 1.
- Nurhadi, Zikri Fachrul, and Achmad Wildan Kurniawan. "Kajian Tentang Efektivitas Pesan Dalam Berkomunikasi." *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran Dan Penelitian* 3, no. 1 (2017): 90–95.
- Pranata, Ananda, Bahjatul Murtasidin, and Sandy Pratama. "Komunikasi Politik (Studi Terhadap Kampanye Politik Pasangan Prabowo-Gibran Dalam Pemilihan Presiden 2024

---

<sup>19</sup> Saputra.

- Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)" 01, no. 04 (2025): 3089–0128.
- Priyatna, Centurion Chandratama, FX. Ari Agung Prastowo, Fajar Syuderajat, and Anwar Sani. "Optimalisasi Teknologi Informasi Oleh Lembaga Pemerintah Dalam Aktivitas Komunikasi Publik." *Jurnal Kajian Komunikasi* 8, no. 1 (2020): 114. <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i1.26115>.
- Ramadani, Thoriq. "Pengelolaan Komunikasi Publik." *Jurnal Good Governance* 15, no. 1 (2019): 11–27. <https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.42>.
- Rizal A, M. Imamul M. "Konsep Dasar Kepemimpinan: Dari Definisi Hingga Tipologi Pemimpin Efektif." *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 1 (2025): 159–66. <https://books.google.co.id/books?id=dITJEAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=NyW3B9GGD0&lr&hl=id&pg=PA24#v=onepage&q&f=false>.
- Saputra, Eka Yudha. "Analisis Gaya Komunikasi Politik Calon Presiden Prabowo Subianto Menjelang Pemilihan Presiden 2024." *Tempo*, 2025. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.11822>.
- Syamsuddin Amin, Ali. "Komunikasi Sebagai Penyebab Dan Solusi Konflik Sosial." *Jurnal Common / 1* (2017).
- Taufiqurokhman. *KEBIJAKAN PUBLIK Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, 2024.
- Uchjana. *Ilmu Komunikasi, Teori Dan Praktek. Komunikasi Dalam Sebuah Organisasi*, 2019.